

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY: PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Adi Sucipto¹, Armadani², Muhammad Amin³

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unikarta

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unikarta

³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unikarta

Alamat Korespondensi: adisucipt59@gmail.com

Abstract

Implementation of the Smart City policy in Kutai Kartanegara is complex because of the wide geographical conditions and there are still isolated areas. The biggest challenge arises from the low understanding and ability of the State Apparatus in utilizing the digitization of information technology-based services. The purpose of this study is to examine the role of Dinas Komunikasi dan Informatika in Kutai Kartanegara Regency in supporting the implementation of Smart City policies. The method used in this research is descriptive qualitative with an analytical framework based on Edward III's theory. The results of this study indicate that as a supporting Regional Apparatus Organization, the role of Diskominfo Kutai Kartanegara in the implementation and socialization of Smart City has not been optimal. From the aspect of resources, the Civil Apparatus at Diskominfo mostly do not have knowledge in the field of information technology. From the aspect of disposition, policy makers have formed a Regent Regulation as the legal frame for Smart City. In the aspect of bureaucratic structure, the role of the supervisor and control function of Diskominfo in each field is still not running.

Keyword: Policy, Smart City, Roles, Information Technology

Abstrak

Implementasi kebijakan Smart City di Kutai Kartanegara tidak mudah karena kondisi geografis yang luas dan masih terdapat wilayah yang terisolir. Tantangan terbesar muncul dari masih rendahnya pemahaman dan kemampuan Aparatur Negara dalam memanfaatkan digitalisasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung implementasi kebijakan Smart City. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai Organisasi Perangkat Daerah pengampu, peran Diskominfo Kutai Kartanegara dalam pengimplementasian maupun sosialisasi Smart City belum optimal. Dari aspek sumber daya Aparatur Sipil di Diskominfo sebagian besar tidak memiliki keilmuan di bidang teknologi informasi. Dari aspek disposisi, para pemangku kebijakan telah membentuk Peraturan Bupati sebagai payung hukum Smart City. Dalam aspek struktur birokrasi, peran fungsi pengawasan dan control Diskominfo di setiap bidang masih belum berjalan.

Kata Kunci: Kebijakan, Smart City, Peran, Teknologi Informatika

Pendahuluan

Perkembangan sebuah kota selaras dengan masalah yang turut menyertainya. Saat ini, kota-kota di berbagai belahan dunia sedang dihadapkan pada isu-isu seperti polusi, konsumsi sumberdaya yang tidak terkontrol, emisi gas, dan *social equality*. Kondisi demikian juga diperburuk dengan peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di kota dan kuantitas lahan perkotaan yang semakin terbatas sehingga pemerintah dituntut untuk dapat mencari alternatif perencanaan dalam menanggulangi isu permasalahan tersebut. *Smart City* dipilih sebagai salah satu gagasan alternatif pemerintah sejak tahun 2017 untuk menjawab persoalan perkotaan di Indonesia. Gagasan gerakan menuju 100 *smart city* resmi diluncurkan pada acara Indonesia *Smart City Summit* 2017 di Makasar bersamaan dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah dengan 25 Kepala Daerah termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpilih untuk menjadi *Pilot Project Smart City*, tentunya setelah melalui seleksi *assessment*. Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai daerah percontohan untuk Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tahun 2021 (Kutairaya.com, 2021).

Implementasi kebijakan *Smart City* di setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan perkembangan yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan di kota Bandung menunjukkan masih kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan, selain itu penerapan *Smart City* yang masih terfokus pada pembangunan teknologi, tetapi mengabaikan dimensi manusia dan institusi. Hal ini berimplikasi pada implementasi *Smart City* di Kota Bandung yang kurang optimal. (Wahyudi, Widowati, & Nugroho, 2022)

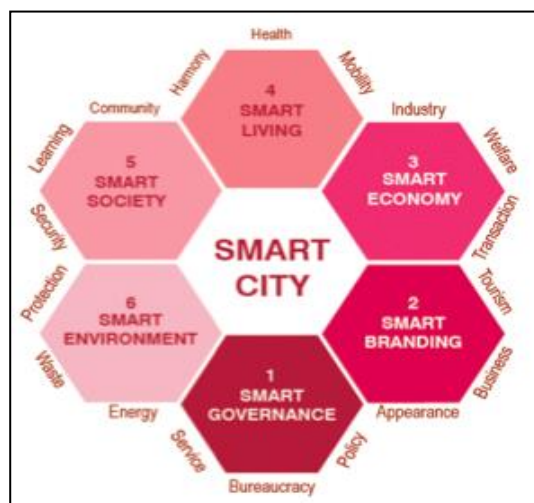
Tantangan yang di hadapi dalam implementasi kebijakan *smart city* di Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada luasan wilayah dan sarana prasarana pendukung karena masih terdapat beberapa daerah yang terisolir. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Kutai Kartanegara untuk menjalankan program-program *smart city*. Selain itu masih terdapat 23 desa yang kondisinya *blank spot* atau tidak ada jaringan, terbanyak di kecamatan Tabang dan selebihnya tersebar di beberapa kecamatan lainnya (Muhammad, 2021). Sumber Daya Manusia juga merupakan aspek penting sebagai penunjang keberhasilan penerapan program *Smart City*, jika melihat kondisi yang terjadi di beberapa perangkat daerah terlihat masih minimnya pemahaman pegawai di pemerintahan yang belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta kondisi lingkungan masyarakat yang dapat membuat pelaksanaan program *Smart city* terhambat. Dari bidang infrastruktur pembangunan Smart Regency Kabupaten Kutai Kartanegara juga masih terkendala pada jaringan Nirkabel, koneksi internet yang belum merata secara keseluruhan di beberapa Kelurahan/Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan kondisi diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung implementasi kebijakan *smart city*.

Kerangka Teori

Konsep *Smart City* kemudian muncul sebagai konsep yang dapat menjadi alternatif bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pengembangan kota. Tahun 1990 menjadi awal perkembangan *smart city*, menurut Albino hal tersebut ditandai dengan penggunaan *Information and Communication Technology* (ICT) dan infrastruktur modern di kota-kota pada saat itu (Ahad, 2020). Konsep smart city sendiri pertama kali digunakan oleh salah satu perusahaan komputer ternama di Amerika yaitu IBM. Perusahaan tersebut memperkenalkan konsep *smart city* untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dengan fokus pada enam indikator antara lain, masyarakat penghuni kota, lingkungan, prasarana, ekonomi, mobilitas, serta konsep *smart living* (Rosandya, 2017). *Smart city* atau yang lebih dikenal dengan sebutan kota cerdas adalah pengembangan kawasan perkotaan dengan konsep mengoptimalkan fungsi dari *Information and Communnication Technologies* (ICT) dan mengintegrasikan pelayanan infrastruktur eksisting dengan teknologi digital. Intervensi teknologi dalam konsep *Smart City* tersebut diharapkan dapat mengatasi isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kota-kota tersebut secara lebih efisien dan berkelanjutan (Ahad, 2020).

Gambar 1. Dimensi Smart City



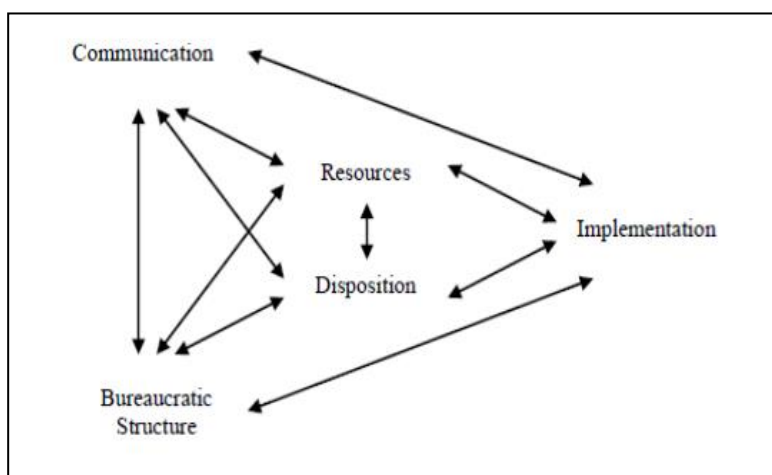
Sumber: Astuti (2018)

Dalam konsep *Smart City* terdapat enam komponen penting, yaitu 1) *smart governance* sebagai pondasi dasar yang berperan sebagai mesin untuk menggerakkan seluruh elemen; 2) *smart branding* berfungsi untuk mempromosikan nilai sebuah kota atau daerah kepada warga; 3) *smart economy* untuk menciptakan *system* ekonomi yang *smart* dengan

membangun ekosistem industry yang tepat, meningkatkan kesejahteraan warganya, dan menyiapkan infrastruktur transaksi yang mudah dan nyaman; 4) *smart living* merupakan gambaran dari lingkungan tempat tinggal yang layak bagi penduduknya; 5) *smart society*, kondisi ideal masyarakat dapat berinteraksi dalam kumpulan individu, sosial dan digital; dan 6) *smart environment* merupakan gambaran komitmen sebuah kota terhadap pelestarian lingkungan, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi (Astuti, 2018). Konsep smart city tersebut yang kemudian akan diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan.

George C. Edwards III menilai implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Untuk melihat lebih jauh peran Dinas Komunikasi dan Informatika, peneliti kaitkan dengan beberapa aspek berdasarkan teori Edward III dalam melihat implementasi kebijakan *smart city*. Seperti yang digambarkan Edwards III dalam Halwatiah (2016), terkait faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

Gambar 2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan



Sumber: Halwatiah, (2016).

Berdasarkan Edwards III dalam Vyandri (2016), dijelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti memilih metode kualitatif (Creswell, 2016), karena dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang informasi lapangan. Untuk mendeskripsikan hasil temuan lapangan, peneliti mbingkainya dengan model analisis deskriptif berdasarkan kerangka teori Edwards dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai sumber literatur. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi (Communication)

Sebagai *leader* percepatan pelaksanaan *Smart City*, Dinas Kominfo Kutai Kartanegara terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung program *Smart City*. Bentuk dukungan tersebut diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan aplikasi Sistem Informasi Elektronik Daerah (SIED) sebagai upaya dalam bentuk dukungan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuju program *smart city* (Arief, 2020). Sosialisasi juga telah dilakukan melalui media cetak dan media sosial, hal ini sesuai yang diungkapkan Kasi Pengembangan Ekosistem *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika pada 27 Mei 2019 sebagai berikut.

“Sosialisasi sudah dilakukan di media seperti Koran hanya itu saja, *Smart City* Kukar hanya bentuk pelayanan organisasi perangkat daerah, lain seperti capil yang bentuknya layanan publik, di PTSP di rumah sakit sebagai layanan, setiap organisasi perangkat daerah mengerjakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelayanan publik itu sudah masuk bagian dalam *Smart City*”.

Selain itu, berdasarkan hasil tinjauan Tim Kemenkominfo terkait program *Smart City* Kutai Kartanegara berdasarkan 6 Dimensi, yaitu *Smart Government* dengan layanan aplikasi *Idaman RT* dari *Disdukcapil*, *Smart Living* dengan layanan *Simpel BPJS* dari *RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja*, *Smart Branding* dengan *Kukar Asia Wonders* dari Dinas Pariwisata, *Smart Economy* dengan *UMKM* dari Dinas Koperasi dan UKM, *Smart Environment* dengan *Bank Sampah* dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan yang terakhir *Smart Society* dengan *Kelompok Informasi Masyarakat* dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Menunjukkan bahwa dari 30 responden yang diwawancara sebagian besar baru mengenal istilah *Smart City* (KOMINFO, 2021).

Maka dapat disimpulkan bahwa pada faktor komunikasi dinilai masih kurang optimal dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat dan koordinasi ke antar OPD. Hal ini didasari dari hasil tinjauan Tim Kemenkominfo terkait program *smart city* Kutai Kartanegara yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta yang menjadi informan baru mengenal istilah *smart city*. Selain itu, berdasarkan pengamatan dari hasil kegiatan sosialisasi program *smart city* di Kabupaten Kutai Kartanegara terbilang sangat kurang dalam menyampaikan informasi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program tersebut. Seharusnya Pemerintah Kabupaten dan seluruh OPD

khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika berusaha mengoptimalkan penggunaan sosial media seperti instagram, Twitter dan facebook dalam melakukan sosialisasi. Penggunaan sosial media sebagai media sosialisasi dipandang efektif karena sebagian besar penduduk Kukar menggunakannya.

Sosialisasi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam menunjang keberhasilan *Smart City* karena yang akan merasakan sebuah program adalah masyarakat, sehingga melalui kegiatan sosialisasi diharapkan dapat mengedukasi masyarakat. Meski demikian, banyak faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan, ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik dikarenakan banyak faktor, diantaranya kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, kepentingan politik, sampai dengan adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan (Winanro, 2015).

Sumberdaya (Resources)

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah yakni sedikitnya pejabat pemerintah yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan program TI. Widodo dalam Zuhad (2018) juga mengungkapkan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan harus cukup, selain itu juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Jika melihat kondisi Sumber Daya Manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, yang menguasai Ilmu Teknologi terbilang masih sangat terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Pengembangan Ekosistem *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar pada 27 Mei 2019 sebagai berikut:

“Program *smart city* selalu berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sumber daya Manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika masih sangat minim dalam ilmu teknologinya, terkadang Dinas Komunikasi dan Informatika kewalahan ketika harus mengelola sistem, terlebih ketika organisasi perangkat daerah terkait butuh pegawai yang mempunyai kemampuan dibidang Ilmu Teknologi, hal ini dikarenakan Sumber daya Manusianya minim. Seharusnya di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki perguruan tinggi yang jurusannya berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga 4 tahun kedepan kita dapat memanfaatkan sumber daya manusia dari perguruan tinggi tersebut”.

Untuk mendukung program *Smart Regency* Kutai Kartanegara, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar terus mendorong secara bertahap rencana pembentukan Kelompok Komunitas Programmer yang dibina Kominfo Kukar. Tugas tim programmer TIK Dinas Kominfo kukar adalah membantu efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik demi terwujudnya “*Kukar Smart City*”, karena

program *smart city* memang bertumpu pada pengembangan *smart government* (Humas Pemkab Kukar, 2021).

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2017 telah melakukan penguatan dalam kegiatan Bimbingan Teknis master *plan Smart Regency* Kukar yang dihadiri 100 orang peserta, termasuk dewan *smart regency* dari seluruh OPD dan tim pelaksana *smart regency* (Poskotakaltimnews.com, 2017). Kegiatan Bimbingan Teknis dalam penyusunan Masterplan *Smart City* yang dipandu langsung tim pembimbing dari Kementerian Kominfo RI juga telah dilakukan pada tahun 2021. Penyusunan *Master Plan Smart City* tidak hanya berfokus pada penguatan infrastruktur, tetapi juga menitik beratkan pada peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, dan berbudaya serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan sesuai dengan Visi Misi Kukar Idaman (Joni, 2021).

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi pegawai sudah mencukupi, tetapi personil dengan latar belakang keilmuan di bidang TI masih terbatas. Upaya yang telah dilakukan oleh Diskominfo adalah dengan membentuk Kelompok Komunitas Programmer dan membentuk tim pelaksana *Smart Regency Kutai Kartanegara*. Tim ini dilegalkan dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 232/SK-BUP/HK/2017 tentang Tim Pelaksana *Smart Regency* Kutai Kartanegara.

Disposisi (Disposition)

Disposisi atau sikap pemimpin dalam implementasi suatu kebijakan sangat menentukan efektivitas dari kebijakan tersebut (Alhawariy, 2021). Sikap tersebut dapat dilihat dari komitmen, pemahaman, respon, dan kejujuran implementor. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Sejak kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai pelaksana program *smart city* pada tahun 2017, Pemerintah bersama DPRD telah merencanakan pembangunan *Smart City* yang kemudian disepakati dengan disebut sebagai *Smart Regency* Kutai Kartanegara dalam RPJMD 2016-2021. Bupati Kutai Kartanegara juga telah menetapkan Dewan dan Tim Pelaksana *Smart Regency* untuk menyusun dan melaksanakan *Master Plan Smart Regency* Kutai Kartanegara. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara juga ditunjuk sebagai *Leader* dalam program kerja (Muhiddin, 2019). Sejalan dengan yang dipaparkan oleh salah satu anggota Dewan Riset Daerah (DRD) bidang TI pada 06 Juli 2019 sebagai berikut:

“Pemerintah telah membuat tim khusus dalam menjalankan program tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku organisasi perangkat daerah yang menjadi koordinator hanya saja ditemukan beberapa kelemahan yaitu hanya sebagian kecil SDM yang mempunyai latar pendidikan dari Ilmu Teknologi”.

Berdasarkan MoU Nomor.19/KOMINFO/HK.03.02/05/2017 dan Nomor.180/MoU-12/HK/2017 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City, disebutkan bahwa Kemenkominfo dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kerjasama yang meliputi sebagai berikut :

- a. Bimbingan teknis penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pertukaran data, dan *legal software* menggunakan *free and open source software (FOSS)*;
- c. Sosialisasi dan *Focus Group Discussion (FGD)* Gerakan Menuju 100 Smart City
- d. Integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- e. Pelatihan Usaha Kecil dan Menengah untuk penggunaan system elektronik khususnya pemasaran secara digital (*UKM Go Digital*).

Selain itu, dalam program *Smart City*, Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Kota Banyuwangi untuk pengembangan *E-Government*. Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan serta pengimplemtasiannya.
- c. Pengembangan Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
- d. Impelemntasi teknis APLIKASI;
- e. Pelatihan dan Pendampingan pelaksanaan teknis APLIKASI;
- f. Pemeliharaan, dan Update Aplikasi yang mungkin terjadi dalam satu tahun terkait dengan aplikasi pada huruf (a); dan
- g. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan para pihak.

Dari dua kesepakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara telah berkomitmen dan bertindak sebagai koordinator dalam implementasi program Smart Regency Kutai Kartanegara secara responsif.

Struktur Birokrasi (Bureucratic Strukture)

Struktur Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, aspek ini mencakup mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Para pembuat kebijakan akan berusaha keras mempengaruhi perilaku birokrasi atau pejabat-pejabat lapangan dalam rangka mempermudah pengimplementasian kebijakan. Edwards III dalam Vyandri (2016), juga menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi, yaitu *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi. SOP

menjadi respon untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks.

Mengingat semua organisasi perangkat daerah menjadi bagian yang penting sehingga dalam penerapan program *smart city*, kompleksitas dalam penerapan *smart city* tidak hanya terkait penerapan Ilmu Teknologi, tetapi juga terkait cara bekerja dan penyelesaian masalah yang cerdas, inovatif dan kreatif. Adanya ketidaksinkronan antar OPD dan hubungan kerja yang disebabkan oleh belum terintegrasinya aplikasi pelayanan setiap OPD. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu Kasubag di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut:

“Dengan adanya penerapan program pemerintah yaitu *Smart City*, Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara ikut serta membantu dalam segi pekerjaan seperti pengerjaan laporan, manajemen keuangan, pelayanan kepada masyarakat dan proses ngajar-mengajar berbasis online dengan memanfaatkan teknologi jaringan. Tapi integrasi antar organisasi perangkat daerah dan Dinas Komunikasi sebagai Koordinator belum terjalin secara optimal seperti hubungan kerja sama. Seperti Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemanfaatan alat yang dimiliki belum optimal seharusnya dapat di maksimalkan sehingga alat-alat dapat digunakan agar dapat meningkatkan pelayanan dan tidak hanya digunakan oleh dinas pendidikan saja tapi dapat tehubungan dengan Dinas-Dinas lain yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Serta hubungan kerja yang belum integrasi secara baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Komunikasi dan Informatika belum memnfasilitasi secara penuh dalam hal inovasi Aplikasi.”

Hal serupa juga diutarakan Kasi Informasi dan Konsultasi Layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 04 juli 2019 sebagai berikut.

“*Smart City* yang telah di terapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sangat baik dari segi pelayanan ke masyarakat serta inovasi-inovasi yang di kembangkan beberapa organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, tapi kendala yang hadapi ketika *Smart City* telah diterapkan kurangnya kolaborasi antar organisasi perangkat daerah pembangunan *Smart City* tidak hanya melibatkan satu atau dua lembaga saja tapi melibatkan semua lembaga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga setiap visi misi *Smart City* bisa berjalan semestinya.”

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari aspek struktur birokrasi sudah terbentuk dengan baik, hanya saja perlu dilakukan pengontrolan pada setiap bidang agar dapat berjalan sesuai target yang ditentukan. Untuk mendukung program *smart city* diperlukan sistem birokrasi yang dapat menciptakan *smart government* dan *smart people*. Harapannya jika antara *smart government* dan *smart people* saling berkorelasi maka akan menunjang keberhasilan dalam pengimplementasian *smart city*.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan pembahasan kebijakan *smart city* dengan menggunakan model implementasi George Edward-III di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengimplementasian *smart city* belum tersosialisasi dengan baik dan merata ke seluruh masyarakat dan OPD, sehingga banyak yang belum mengetahui program *smart city* atau *Smart Regency Kutai Kartanegara*. Selain itu, minimnya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membuat sistem tidak terhimpun menjadi satu sehingga banyak aplikasi yang digunakan dalam melakukan pelayanan.

Dari aspek sumberdaya, Diskominfo telah berupaya mengatasi persoalannya terbatasnya pegawai dengan latar belakang non-IT dengan membentuk Kelompok Komunitas Programmer. Kelompok tersebut menjadi penggerak esensial dalam pelaksanaan program *Smart Regency*.

Dari aspek disposisi, dukungan pemangku kebijakan sudah cukup optimal. Hal ini dibuktikan dari telah terbentuknya kesepakatan-kesepakatan antara Kementerian dan dengan daerah lain. Dinas Komunikasi dan Informatika juga berperan penting dalam kegiatan evaluasi setiap inovasi yang menjadi program pemerintah, sehingga penerapan *Smart Regency* sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan Kepala Daerah yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dari aspek struktur birokrasi, struktur tim pelaksana *Smart City* sudah terbentuk dan diakui secara legal. Program *smart city* memerlukan dukungan sistem birokrasi yang dapat menciptakan *smart government* dan *smart people*. Tetapi terdapat hal yang perlu ditingkatkan oleh Diskominfo Kukar, yaitu penguatan pengawasan program *Smart City* agar dapat berjalan sesuai target yang ditentukan.

Daftar Pustaka

- Ahad, M. A. (2020). Enabling technologies and sustainable smart cities. *Sustainable cities and society*, 61, 102301.
- Alhawariy, S. (2016). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 343-354.
- Arief. (2020, Juli 16). *Dinas Kominfo Kukar Perkenalkan SIED, Bahteramsyah: Ini Wujud Implementasi Kukar Menuju Smart City* . Diambil kembali dari Kaltimnews.co: <https://www.kaltimnews.co/posts/view/859/dinas-kominfo-kukar-perkenalkan-sied-bahteramsyah-ini-wujud-implementasi-kukar-menuju-smart-city.html>
- Astuti, I. F. (2018). Smart City Kutai Kartanegara Dengan Pendekatan Framework Citiasia: Sebuah Kajian Analisis. . *Sebatik*, 22(2), 219-225.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design Pendekatan kualitatif, kuantitatif, and Mixed (edisi ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halwatiah. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 51-77.
- Humas Pemkab Kukar. (2021, Januari 7). *DISKOMINFO Berencana Membentuk Komunitas Programmer TIK di KUKAR*. Diambil kembali dari humas.kukarkab.go.id: <https://humas.kukarkab.go.id/read/news/1623/diskominfo-berencana-membentuk-komunitas-programmer-tik-di-kukar>
- Joni, A. (2021, Juni 30). *Diskominfo Kukar dan Kementerian Kominfo Gelar Bimtek Penyusunan Masterplan Smart City Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Diskominfo Kukar dan Kementerian Kominfo Gelar Bimtek Penyusunan Masterplan Smart City*, <https://kaltim.tribun>. Diambil kembali dari [TribunKaltim.co](https://kaltim.tribunnews.com/2021/06/30/diskominfo-kukar-dan-kementerian-kominfo-gelar-bimtek-penyusunan-masterplan-smart-city): <https://kaltim.tribunnews.com/2021/06/30/diskominfo-kukar-dan-kementerian-kominfo-gelar-bimtek-penyusunan-masterplan-smart-city>
- KOMINFO. (2021, 6 5). *Dilakukan Secara Virtual, Tim Kemenkominfo Tinjau Program Smart City Kutai Kartanegara*. Diambil kembali dari [diskominfo.kukarkab](https://diskominfo.kukarkab.go.id): <https://diskominfo.kukarkab.go.id/berita/detail/319>
- Kutairaya.com. (2021, 5 20). *Kukar Ditetapkan Salah Satu Daerah Percontohan Program Gerakan Menuju Kota Cerdas*. Diambil kembali dari [Kutairaya.com](http://www.kutairaya.com/news.php?id=3895): <http://www.kutairaya.com/news.php?id=3895>
- Muhammad. (2021, 5 20). *Kukar Mantapkan Pengembangan Smart City*. Diambil kembali dari KALTIMTARA.ID: <https://kaltimtara.id/kukar-mantapkan-pengembangan-smart-city/>
- Muhiddin, A. H. (2019, Oktober 26). *Kutai Kartanegara Akselerasi Visi Smart City*. Diambil kembali dari [Antaranews.com](https://kaltim.antaranews.com/berita/64412/kutai-kartanegara-akselerasi-visi-smart-city): <https://kaltim.antaranews.com/berita/64412/kutai-kartanegara-akselerasi-visi-smart-city>

- Rosandya, R. (2017, November 25). *Langkah Menuju "100 Smart City*. Diambil kembali dari *Harian Ekonomi Neraca*: <https://www.neraca.co.id/article/93533/langkah-menuju-100-smart-city>
- Vyandri, M. A. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BPJS KESEHATAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan Dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 343 - 354.
- Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. A. (2022). STRATEGI IMPLEMENTASI SMART CITY KOTA BANDUNG. *Jurnal Good Governance*, 87-98.
- Winanro, B. (2015). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Zuhad, S. F. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAAN PADA SEKTOR PUBLIK (Studi tentang Aspek Penahapan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Universitas Brawijaya Malang). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 980-991.